

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP NEW ZEALAND UNTUK MENGATASI ISU INTERNASIONALISASI PAPUA DI DUNIA

Arie Tri Hedhianto¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This study explores the dynamics of the internationalization of the Papua issue and analyzes factors that can enhance defense cooperation between Indonesia and New Zealand in addressing this challenge. The internationalization of Papua has become a significant threat to Indonesia's sovereignty, particularly due to support from South Pacific nations. In this context, defense diplomacy plays a crucial role in maintaining regional stability and national sovereignty. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and relevant literature reviews. The findings reveal that strong defense cooperation between Indonesia and New Zealand can effectively mitigate the internationalization of the Papua issue. This cooperation not only strengthens bilateral relations but also enhances national defense capabilities. The study provides strategic recommendations for the Indonesian government to continue developing defense diplomacy with New Zealand, including increased intensity of military dialogue, intelligence exchange, and joint military exercises. These recommendations aim to bolster Indonesia's position in facing global challenges related to the Papua issue and in maintaining the integrity of the Indonesian state.

Keywords: Papua Internationalization; Defense Diplomacy; Bilateral Cooperation.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika isu internasionalisasi Papua dan menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Selandia Baru dalam mengatasi isu tersebut. Isu internasionalisasi Papua telah menjadi tantangan serius bagi kedaulatan Indonesia, terutama dengan adanya dukungan dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan memegang peran penting dalam menjaga stabilitas regional dan kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan yang kuat antara Indonesia dan Selandia Baru dapat berfungsi sebagai strategi efektif dalam meredam isu internasionalisasi Papua. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral tetapi juga meningkatkan kapasitas pertahanan nasional. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan diplomasi pertahanan dengan Selandia Baru, termasuk peningkatan intensitas dialog militer, pertukaran informasi intelijen, dan latihan militer bersama. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global terkait dengan isu Papua dan menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Kata Kunci: Internasionalisasi Papua; Diplomasi Pertahanan; Kerjasama Bilateral.

PENDAHULUAN

Tantangan bagi kedaulatan wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) tidak semakin ringan. Pergeseran kekuatan dari belahan dunia Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan berpengaruh kuat terhadap kondisi keamanan di kawasan Asia Pasifik. NKRI kini berada diantara dua kekuatan negara besar yaitu RRC dan Amerika Serikat serta negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Korea, India, Australia dan Singapura. Namun demikian, wilayah Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Pasifik Selatan yang

merupakan gugusan-gugusan kepulauan yang terdiri dari berbagai negara kecil yang ada di selatan Samudera Pasifik. Kawasan-kawasan ini dijuluki sebagai *Pacific Rim* (Baskom Pasifik). Gugusan pulau-pulau ini berada di sebelah timur Indonesia lebih tepatnya dekat dengan Pulau Papua dan negara Papua Nugini. Istilah Pasifik Selatan digunakan pada *South Pacific Forum* (SPF) yang diadakan pada tahun 1971 yang terdiri dari 16 negara yaitu Australia, Selandia Baru, Cook Island, Fiji, Karibiati, Marshall Island Nauru, Niue, Tokelau, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Timor Leste dan negara-negara teritori milik Amerika Serikat (Arya, 2020).

Pemerintah Indonesia selama ini menegaskan Papua adalah masalah dalam negeri dan tidak memerlukan campur tangan asing. Jakarta memandang status Papua sudah final karena hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 mendukung integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia dan hasilnya diterima PBB. Tetapi bagi kelompok-kelompok yang beraspirasi agar Papua pisah dari Indonesia, Pepera justru menjadi pangkal persoalan. Mereka berdalih hasil tersebut tidak dapat diterima karena tidak dilaksanakan dengan cara satu orang satu suara sehingga validitasnya dipertanyakan. ULMWP memasang target untuk mendapat dukungan dua pertiga negara-negara anggota PBB, dan sejauh ini Vanuatu bertindak selaku negara sponsor dengan dukungan beberapa negara sahabatnya di PBB. (Bonasir, 2019).

Lebih lanjut, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan bahwa terdapat kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin melihat konteks Papua dalam perspektif yang berbeda, namun sepenuhnya persoalan yang di hadapi adalah untuk terus fokus pada strategi dan kebijakan nasional dan tentu ada langkah-langkah yang harus disempurnakan atau diperbaiki lebih lanjut. (Bonasir, 2019).

Elisabaeth, A. (2004) menjelaskan bahwa terdapat tiga aktor utama yang terlibat dalam konflik di Papua dan berada di level lokal, nasional, dan internasional, yakni negara/pemerintah (*state*), masyarakat (*society*), dan pebisnis (*market*). Peran dan kepentingan ketiga aktor utama tersebut relatif berhasil dan mudah dipetakan. Namun, tidak demikian dengan pemetaan pola hubungan di antara para aktor tersebut. Selain karena banyaknya jumlah aktor yang terlibat (baik langsung maupun tidak langsung), kesulitan tersebut juga disebabkan setiap aktor memiliki lebih dari satu kepentingan dan antara satu kepentingan dengan kepentingan lain cenderung saling berhubungan.

Di sisi lain dalam dunia internasional, Evakurniadji (2018) menjelaskan bahwa anggota Parlemen Selandia Baru menyatakan tidak akan membantu gerakan Papua Merdeka. Mereka menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya mendukung Gerakan aktivis Papua Merdeka, termasuk di dalam nya upaya yang sedang digalang untuk memasukkan Papua dalam Daftar Dekolonisasi di PBB. Bahkan anggota parlemen Selandia Baru berjanji untuk mendukung percepatan seluruh kemajuan di segala bidang Papua.

Di tahun 2019, Safitri, E. (2019) menambahkan bahwa kunjungan empat anggota parlemen Selandia Baru (New Zealand), dijelaskan bahwa mereka para anggota parlemen dari Selandia Baru mendukung Papua sebagai bagian dari Indonesia. Mahfud MD memberikan penegasan kepada Selandia Baru sebagai negara sahabat Indonesia yang sangat mendukung integrasi atau keutuhan wilayah Indonesia termasuk sangat mendukung soal Papua sebagai bagian dari Indonesia. Mahfud menegaskan dukungan Selandia Baru terkait keutuhan Papua milik NKRI diperlukan bukan hanya secara politik namun juga secara konstitusional. Hal itu guna mempertahankan apa yang sudah menjadi keputusan internasional. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, memang belum terlihat pasti bentuk dukungan dari Selandia Baru terkait dengan kasus di Papua.

Namun seiring berjalannya waktu, penanganan gerakan seaparatisme di Papua yang dilakukan oleh TNI serta komponen bangsa lainnya telah menimbulkan isu

internasionalisasi Papua yang dibangun oleh kelompok politik yang terwadahi dalam organisasi *United Liberation For West Papua Movement* (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda) serta Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dipimpin Agus Kossay. Kedua pemimpin tersebut mengakui bahwa organisasi tersebut merupakan kendaraan politik seluruh rakyat Papua serta telah melakukan lobi-lobi di dunia internasional. (Anriani, 2019).

Latar belakang dari permasalahan tersebut diatas, Peneliti merasa penting untuk mengangkat diplomasi pertahanan antara Indonesia dengan New Zealand dengan judul **“Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap New Zealand untuk mengatasi isu internasionalisasi papua di dunia.”** Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam memelihara hubungan diplomasi pertahanan antara RI dengan New Zealand sehingga mampu memperoleh keuntungan diplomatik dalam mengatasi isu internasionalisasi Papua. Adapun unsur-unsur yang dapat mendukung keberhasilan diplomasi pertahanan, yaitu menyamakan persepsi Cara Pandang tentang Papua antara Indonesia dengan New Zealand, meningkatkan intensitas dan kualitas diplomasi pertahanan, dukungan peranti lunak dan peranti keras, serta pembangunan postur kekuatan TNI yang berada di wilayah Papua.

KERANGKA ANALITIK

Diplomasi pertahanan pada masa Perang Dingin digunakan untuk mencapai tujuan geostrategi yang termasuk di dalamnya penguatan kapabilitas militer negara sahabat dan aliansi untuk melawan musuh bersama. Setelah Perang Dingin usai, ancaman negara pun mengalami perubahan, militer akhirnya digunakan untuk upaya damai untuk mencegah konflik, penanganan bencana alam, dan untuk lebih banyak terlibat dalam upaya diplomasi pertahanan. Hal ini menjadi upaya yang efektif dalam mempromosikan pemerintahan yang baik dan akuntabel (Pedrason, 2015, hal. 7)

Konsep diplomasi pertahanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Inggris melalui *Strategic Defense Review* pada tahun 1998 ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik terkait pencegahan konflik dan mengelola krisis. Konsep ini memadukan antara militer dengan unsur diplomatik lainnya dalam satu pandangan yaitu mencegah konflik atau mengelola krisis. Diplomasi pertahanan adalah keterpaduan antara dua instansi dan disebut juga kerjasama yang saling menguntungkan antara diplomasi dan pertahanan (Supriyatno, 2014, hal. 155-156).

Terdapat tiga karakteristik dari diplomasi pertahanan menurut Rodon Pedrason. Pertama, diplomasi pertahanan ditujukan untuk membangun rasa saling percaya dimana akan dapat mencegah konflik melalui persepsi yang diperkuat dengan kepentingan bersama dengan yang sebelumnya menjadi musuh atau yang dapat menjadi musuh yang potensial. Dengan demikian, rasa saling percaya dan pengertian bisa dibangun dan wilayah kerjasama yang lebih luas dapat dicapai. Kedua, diplomasi pertahanan adalah proses untuk membangun tata pemerintahan yang baik dimana masyarakat sipil mengendalikan militer. Dalam hal ini, diplomasi pertahanan dapat mendorong reformasi keamanan dan pertahanan di Indonesia yang berarti kontrol sipil terhadap kebijakan pertahanan dan angkatan bersenjata. Ketiga, diplomasi pertahanan adalah sarana untuk mewujudkan tujuan luar negeri dan keamanan yang lebih luas melalui dukungan dari negara lain dalam wilayah kerjasama pertahanan, bantuan kemanusiaan, keamanan antar negara, dan kapasitas perdamaian (Pedrason, 2015, hal. 17).

Menurut sejarah, asal kata kedaulatan berasal dari Bahasa Inggris, *Sovereignty*. Tiap negara memiliki sifat kedaulatan yang melekat kepadanya, karena kedaulatan merupakan

sifat dan ciri hakiki suatu negara yang merdeka. Jika dikaitkan dengan negara yang berdaulat, maka makna yang terkandung adalah bahwa negara tersebut memiliki suatu kekuasaan tertinggi dan secara *de facto* menguasai wilayah tersebut (E. Suherman, 1984). Lebih lanjut, JG Starke (2004) menyatakan bahwa munculnya konsep kedaulatan teritorial menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini, yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang mengenyampingkan negara-negara lain. Artinya, jika terjadi ancaman pada kedaulatan suatu negara, maka hal ini juga menjadi ancaman bagi orang-orang dan harta benda yang ada di dalam wilayah negara tersebut.

Mencermati Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara. Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen. (Dam, S. & Riswandi, 1995).

Strategi atau "*Strategos*" menurut Liddle (1967) diartikan sebagai *the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy* (seni/ketrampilan mendistribusikan dan menggunakan (*ways*) sarana militer (*means*) untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan (*ends*). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Strategi adalah Ilmu dan seni menentukan tujuan (*ends*), merumuskan cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan menentukan sarana prasarana (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sehingga rumusan suatu strategi harus mengandung tujuan (*ends*), cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan sarana prasarana (*means*) yang digunakan.

Hal ini didukung oleh pernyataan Suroyo (2012) yang menjelaskan bahwa dalam perumusan strategi harus mengandung 3 elemen penting yang seimbang, yakni *ends* (sasaran, tujuan, target), *ways* (cara bertindak, konsep, metode) dan *means* (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi). Dengan demikian, strategi yang dimiliki oleh Indonesia dalam rangka meningkatkan diplomasi pertahanan dengan New Zealand akan berhubungan dengan *Ends* (tujuan akhir), *Means* (modal utama) dan *Ways* (cara-cara) guna mengatasi isu internasionalisasi Papua.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dimana Sugiono (2012) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang instrument kuncinya terletak pada peneliti, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang pendekatannya mengeksplorasi fenomena yang tidak dapat dideskripsikan menggunakan numerikal atau angka. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan fenomenologi. Creswell, J. (2014) menjelaskan bahwa pendekatan fenomenologi sebagai suatu pendekatan dalam sosiologi yang mengidentifikasi masalah dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna kepada dunia yang penuh dengan objek-objek yang bermakna, suatu hal yang semula terjadi dalam kesadaran individual secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi-interaksi antara kesadaran-kesadaran.

PEMBAHASAN

Dinamika isu internasional tentang konflik Papua merupakan satu-satunya konflik di Indonesia yang akar permasalahannya belum terselesaikan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya gejolak-gejolak isu pemisahan diri (disintegrasi) dan eksistensi ‘Organisasi Papua Merdeka’ atau sering disebut ‘Kelompok Kriminal Bersenjata’ yang saat ini telah di label sebagai teroris baik dari dalam maupun luar negeri. Sebelumnya, konflik Timor Leste diakhiri melalui referendum tahun 1999 dan konflik Aceh diakhiri dengan Kesepakatan Helsinki tahun 2005. Sedangkan Papua sampai saat ini belum mendapat skema resolusi konflik yang tepat sehingga konflik Papua seringkali di ibaratkan seperti ‘bom waktu’.

Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa kasus Papua sudah final melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang menyatakan integrasi ke NKRI, fakta menunjukkan bahwa isu Papua saat ini telah di internasionalisasi oleh aktor negara dan non- negara dengan mengungkit isu pelanggaran HAM dan legalitas PEPERA serta pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang dinilai belum membawa perubahan signifikan.

Studi yang dilakukan oleh Elisabeth (2006) menjelaskan bahwa tujuan internasionalisasi isu Papua adalah untuk menarik perhatian dunia dan mendukung kemerdekaan Papua. Hal tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1962 sebagai bentuk perlawanan terhadap Perjanjian New York yang mendorong masuknya Papua ke NKRI, dan kemudian mendapat momentum pada Kongres Papua II tahun 2000 dimana ‘internasionalisasi isu Papua’ dijadikan sebagai salah satu rekomendasi kongres dengan pembentukan sebuah tim untuk melobi komunitas internasional.

Negara Vanuatu bahkan meminta Mahkamah Internasional untuk memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan PEPERA tahun 1969 karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan internasional (Radio New Zealand, 2010). Sedangkan aktor non-negara diantaranya adalah gereja Pasifik, media online, dan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua). Sekretaris Jenderal PCC (Pacific Conference of Churches) Pendeta Francois Pihaatae mengatakan bahwa para pemimpin gereja harus berbicara tentang masalah Papua tidak hanya dari mimbar, tetapi mereka juga harus berbicara kepada pemerintah Kepulauan Pasifik (ABC News, 2014). Media online juga berperan dalam penyebaran informasi terkait masalah Papua, seperti Vanuatu Daily Post “Free West Papua”, The Fiji Times “Solidarity and Support for West Papua”, dan masih banyak lainnya. Sementara ULMWP dalam keanggotaan Melanesian Spearhead Group (MSG) berperan sebagai representatif dari diaspora Papua di luar negeri. Namun, perlu diakui bahwa counter-attack diplomasi Indonesia diluar negeri cukup signifikan, seperti argumen pembelaan diplomat-diplomat Indonesia di sidang PBB terhadap isu Papua yang di gemakan komunitas Pasifik dan juga keberhasilan Indonesia menjadi anggota asosiasi MSG.

Selain dari sisi internasional, penting juga untuk melihat Papua dari sisi domestik seperti mereview pelaksanaan otsus Papua. Hal ini menjadi penting karena otsus memberikan gambaran kekinian terkait kondisi internal Papua yang pada akhirnya akan membentuk persepsi publik terhadap Papua. Dengan kata lain, semakin baik perjalanan otsus Papua, semakin kecil isu Papua di gemakan di dalam maupun luar negeri. Konflik di Papua Barat antara Pergerakan Kemerdekaan Papua Barat dan aparat Indonesia menyebabkan adanya perhatian internasional yang mengindikasikan terdapatnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu pejuang Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda, yang merupakan pemimpin koalisi organisasi Pergerakan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) dan pendiri gerakan Free West Papua menjadi tokoh populer dalam masifnya perhatian internasional terhadap isu Papua Barat. Benny Wenda

yang merupakan ekspatriat Indonesia di Inggris terus mengkampanyekan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di tanah Papua Barat. Kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Benny Wenda mendapatkan perhatian internasional, khususnya dari INGOs yang berfokus di bidang HAM. INGOs berperan dalam memasifkan kampanye Benny Wenda serta menggerakkan lebih banyak masyarakat di dunia untuk peduli terhadap isu HAM yang terjadi di Papua Barat. Benny Wenda tidak bisa merepresentasikan seluruh rakyat Papua, seperti halnya penolakan Operasi Papua Merdeka (OPM) atas deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Benny Wenda. Peristiwa tersebut jelas menggambarkan bahwa yang dilakukan oleh Benny Wenda tidak bisa merepresentasikan seluruh rakyat Papua Barat namun apa yang telah dilakukan oleh Benny Wenda jelas memberikan dampak kepada Pergerakan Kemerdekaan Papua Barat khususnya di dunia internasional. Deklarasi yang dilakukan oleh Benny Wenda dianggap merupakan upaya Benny Wenda untuk menunjukkan eksistensi gerakannya ditengah meredupnya informasi tentang konflik Papua Barat karena adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut telah berhasil menarik perhatian internasional khususnya dari INGOs HAM yang memberikan respon terhadap apa yang dilakukan Benny Wenda, selain itu deklarasi tersebut juga telah berhasil mendapatkan perhatian dari Indonesia. Aktivitas yang dilakukan oleh INGOs dalam memberi perhatian terhadap isu Papua Barat dinilai dapat mengancam kedaulatan Negara Indonesia yang menganggap Papua merupakan bagian dari wilayahnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas-aktivitas kampanye yang dilakukan oleh INGOs sebagai dukungan kepada masyarakat Papua Barat, Pergerakan Kemerdekaan Papua Barat, maupun Benny Wenda secara personal, merupakan upaya yang dapat memberikan gangguan kepada Indonesia selaku sebuah negara berdaulat.

Beberapa INGOs secara terang-terangan memberikan dukungannya kepada Pergerakan Kemerdekaan Papua Barat seperti Amnesty International yang berupa desakan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi atas pelanggaran HAM yang berupa pembunuhan di luar hukum dalam konflik Papua Barat antara kelompok Pergerakan Kemerdekaan Papua Barat dan aparat Indonesia yang juga menelan korban sipil seperti yang masih baru terjadi pada tahun 2021 dan menewaskan seorang perawat.¹ INGOs lain adalah Fair Trials International yang mengkritik Interpol atas pemasukan Benny Wenda yang mengkampanyekan Kemerdekaan Papua Barat ke dalam daftar Red Notice Interpol. Tidak hanya mengkritik, bahkan Fair Trials International turut melakukan intervensi terhadap Interpol agar memperbaiki sistem Red Notice yang dinilai kerap disalahgunakan oleh negara- negara diktator.² fPcN juga menjadi INGOs yang memiliki peranan penting dalam pergerakan kemerdekaan Papua Barat. fPcN merupakan INGOs yang memberikan asistensi kepada Benny Wenda untuk mendapatkan suaka di Inggris setelah terbang dari Papua Nugini.³ INGOs HAM lainnya yang memiliki ketertarikan mendalam pada isu di Papua Barat adalah Tapol. Tapol yang merupakan INGOs asal Inggris dan dibentuk oleh mantan tahanan politik dari Indonesia melakukan upaya untuk dimungkinkannya adanya kunjungan Komisi HAM PBB dan komunitas internasional lain ke Papua Barat.

Penggunaan diplomasi kebudayaan ini juga bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia ke Kawasan Pasifik. Kepentingan utama untuk menguatkan diplomasi ke Pasifik selain dikarenakan mereka adalah tetangga Indonesia, negara-negara Pasifik sering memiliki posisi politik yang kontradiktif dengan Indonesia terkait isu separatisme di Papua. Terdapat perbedaan pendapat yang sangat tajam ketika berbicara Papua secara entitas yang menjadi kesatuan dengan Indonesia. Beberapa pakar berpendapat bahwasanya perhatian besar komunitas politik di Pasifik terhadap isu Papua memiliki korelasi dengan semangat menentang kolonialisme yang menjadi faktor dalam pembentukan paradigma diplomasi baru negara- negara Kepulauan Pasifik (Fry & Tarte 2015: 3). Selanjutnya Fry dan Tarte

(2015) menjelaskan diplomasi Pasifik baru adalah Langkah fundamental yang dilakukan oleh negara-negara Kepulauan Pasifik yang independen untuk menciptakan sistem diplomatik poskolonial. Independensi dan kedaulatan yang menjadi nilai-nilai penting dalam diplomasi Pasifik menjadi elemen strategis dalam membentuk Forum Kepulauan Pasifik. Sebagai negara kecil, para pemimpin di Kepulauan Pasifik berkomitmen untuk meningkatkan peran dalam urusanglobal dengan membentuk forum di level regional dengan menyuarakan isu-isu yang menjadi perhatian mereka. Diplomasi Pasifik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fry dan Tarte (2015), merupakan suatu upaya negara-negara Kepulauan Pasifik untuk mengambil posisi dan terlibat dalam diplomasi global untuk menegosiasikan persoalan seperti perdagangan, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, masalah nuklir, dekolonisasi, dan perikanan. Dalam hubungannya dengan Indonesia, masalah kemerdekaan Papua adalah salah satu agenda yang terus diperdebatkan oleh negara-negara di Kepulauan Pasifik. Masalah ini adalah bagian dari diplomasi Pasifik untuk mendorong dan menyelesaikan masalah dekolonisasi (Fry & Tarte, 2015).

Dalam menghadapi ini, Indonesia harus mampu membangun narasidan persepsi yang dapat menjadi *counterbalance* terhadap narasi politis yang dibangun oleh negara-negara Pasifik melalui diplomasi baru poskolonial di sana. Salah satu cara yang sangat penting adalah membangun proksimitas kultural antara Indonesia dengan negara-negara di Pasifik. Indonesia harus mampu menggunakan perbendaharaan kulturalnya dalam menghadapi serangan negara-negara Pasifik dalam konteks isu Papua. Pada koridor ini diplomasi kebudayaan untuk meningkatkan keterlibatan Indonesia dengan negara-negara Pasifik sangat penting. Walaupun, diplomasi kebudayaan yang dilakukan tidak bisa dimaknai secara sempit hanya untuk memenuhi kepentingan tersebut, seperti yang diungkapkan narasumber penelitian ini yang nampak dalam penjelasan di bawah ini.

Kebijakan kita di Pasifik itu semakin lama memang semakin kita perkuat. Alasannya sudah sangat jelas; pertama, ada kesamaan latarbelakang, dan kedua, ini adalah negara tetangga kita. Itu adalah negara tetangga kita di sebelah selatan, Indonesia itu kan terletak antara Asia dan Pasifik, kalau ada negara yang bisa mengklaim bahwa mereka adalah sebagian Asia dan sebagian Pasifik, menurut saya itu hanya ada dua negara yang bisa bilang begitu, yang pertama Indonesia dan kedua Filipina. Sebenarnya kalau integritas teritorial kami menyebutnya, itu adalah *basic* dari kebijakan luar negeri kita. Itu mau dimanapun, mau di Selandia Baru, mau dimana pun pasti kita seperti itu. Nah sekarang soal *'The Symphony of Friendship'*, jadi *engagement* kita dengan Pasifik, mungkin betul salah satunya adalah dengan menjaga integritas teritorial wilayah kita. Tapi bukan dengan negara Pasifika saja kita begitu. Artinya dengan negaramanapun, salah satu *basic* kita dalam melakukan kebijakan luar negeri yaitu, integritas teritorial. Soal Papua, itu bukan satu-satunya alasan kita meningkatkan *engagement* dengan Pasifik. Mau itu ada atau tidak isu tentang separatisme, kita punya obligasi untuk meningkatkan *engagement* kita dengan negara Pasifik karena Pasifik itu adalah kawasan yang sangat penting buat Indonesia. Jadi kita suka lupa kalau Pasifik itu adalah salah satu *trade road* yang paling penting di seluruh dunia gitu, karena dia menghubungkan Amerika dengan Asia. Jadi itu merupakan jalur kapal-kapal dagang besar. Kawasan Pasifik itu menjadi kawasan favorit karena mereka memang penting. Di luar itu ada rivalitas negara besar di Pasifik untuk menancapkan pengaruhnya di Pasifik. Contohnya, saya mau cerita juga bahwa kita punya kebijakan kita untuk Pasifik yang namanya *'Pacific Elevation'*, nah Selandia Baru punya yang namanya *'Pacific Reset'* (wawancara dengan narasumber, 2021).

Namun, membangun kedekatan dengan Kawasan Pasifik melalui diplomasi kebudayaan tidak hanya penting dalam koridor keamanan nasional Indonesia. Indonesia

sangat menyadari bahwa Kawasan Pasifik juga merupakan rute dagang penting di Barat dan Selatan. Sehingga kedekatan dengan negara-negara di sana juga akan sangat bermanfaat bagi kepentingan ekonomi Indonesia hari ini dan di masa yang akan datang. Diplomasi Kebudayaan Indonesia melalui ‘*The Symphony of Friendship*’ di Selandia Baru menyasar banyak tujuan-tujuan penting yang harus terus dijaga dan dikembangkan dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia tidak hanya dalam kaitan bilateral dengan negara-negara di Pasifik Selatan namun juga membangun citra positif Indonesia di mata negara-negara Pasifik yang dapat sangat berguna dalam menjaga nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Selandia Baru adalah negara yang paling tepat dalam melaksanakan strategi ini sehingga diplomasi kebudayaan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Konflik Papua merupakan konflik yang memakan periode waktu yang lama dan sampai saat ini perkembangan resolusi konflik berjalan cukup pelan. Konflik yang selalu menjadi masalah dalam konflik Papua berhubungan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) pembangunan, kesejahteraan, sumber daya alam dan perbedaan persepsi sejarah. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua sampai saat ini belum menemukan titik temu antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Pada dasarnya Konflik Papua merupakan konflik internal yang tidak dapat diganggu oleh masyarakat internasional. Papua merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia dan aktor rasional negara lain tidak dapat melakukan intervensi dikarenakan adanya penghormatan pada prinsip non- intervention dari PBB. Namun Upaya tersebut hingga saat ini masih digaungkan dengan berbagai cara seperti mengangkat kasus Papua ke dalam sidang umum PBB.

Percepatan Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Dengan adanya percepatan revisi UU Otonomi Khusus Papua, dapat menjadi sebuah peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efektifitas percepatan pembangunan di Papua. Dialog merupakan salah satu cara dalam upaya resolusi konflik. Dengan adanya dialog makan penyamaan persepsi dapat dilakukan dan dapat mencari jalan dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan penelitian, salah satu penghambat adanya jalur dialog adalah perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat Papua.

Memperkuat Hubungan Diplomasi antara Indonesia-Selandia Baru. Untuk Membuka Pintu Diplomatik Dengan MSG. Selandia baru merupakan negara yang memiliki posisi krusial dalam di wilayah pasifik. Posisi krusial tersebut berdasarkan data yang menunjukkan bahwa Selandia Baru menempatkan wilayah pasifik menjadi pasar dalam perdagangan internasional. Dengan begitu negara-negara MSG akan merasakan kekuatan diplomasi Indonesia yang kuat sehingga akan melakukan konsiderasi ulang apabila negara-negara MSG akan melayangkan kritik konflik Papua di ranah internal.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia terhadap New Zealand untuk mengatasi isu internasionalisasi Papua di Dunia dilakukan berlandaskan aspek seni dan kebudayaan dalam mencapaitujuan politik untuk membangun persepsi dan citra Indonesia di mata negara-negara Pasifik Selatan. Selandia Baru dipilih atas dasar realitas bahwa negara tersebut adalah *melting pot* komunitas Pasifik Selatan. Oleh karenanya, melaksanakan event besar terkait kebudayaan Indonesia- Pasifik di sana akan menjadi etalase penting dari kedekatan Indonesia dengan seluruh masyarakat Pasifik secara kultural. Aspek kultural menjadi perekat yang digunakan untuk membangun ikatan persahabatan dengan negara-negara Pasifik Selatan, dan meniadakan permusuhan yang

beberapa terkali di panggung diplomasi global seperti perdebatan antara Indonesia dengan beberapa negara Pasifik di forum majelis umum PBB terkait isu Papua. Namun kepentingan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat Pasifik bukan hanya berbicara masalah keamanan, namun juga potensi dagang yang menjadikan Kawasan Pasifik sangat penting dalam kaitan rute dagang ke Barat. Demikian penelitian ini telah menemukan berbagai aspek penting yang terjadi dalam upaya diplomasi kebudayaan tersebut di Selandia Baru.

Perkembangan polemik Isu Internasionalisasi Separatisme Papua dapat dianalisa dengan mempertimbangkan Menangani penyelesaian polemik isu internasionalisasi separatisme Papua dengan menerapkan diplomasi total bukan hanya berdasar pada diplomasi formal melainkan melakukan pendekatan ke dalam berbagai aspek yang cenderung ke arah non-formal dan Melakukan dialog dengan para aktivis separatis Papua untuk menemukan solusi atau penyelesaian permasalahan Papua yang memberikan jalan tengah baik bagi Indonesia dan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy: Theory and Practice*, 2nd ed. New York: Palgrave
- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, New York: Palgrave Macmillan.
- Creswell, J.. (2014). *Research Design Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dam, S. & Riswandi. (1995). *Kerjasama ASEAN, latar belakang, perkembangan dan masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dirjen Strahan Kemhan RI. (2017). *Perkembangan Keamanan Kawasan Pasifik Selatan dan Pengaruhnya Terhadap Pertahanan Negara Indonesia*. Jakarta : Kemhan RI hal 3.
- Djalal, H. (1990). *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa*. CSIS, Jakarta.
- East, M.A. et.al. (1978). *Why Nations act: Theoretical Perspective for Comparative foreign policy studies*. California: Sage Publication Inc.
- Suherman, E.. (1984). *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Elisabeth, A. , dkk. (2004). *Peran dan Kepentingan Para Aktor dalam Konflik di Papua*. Jakarta: LIPI.
- Haas, M. (2013). *International and Regional Cooperation. In : Asian and Pacific Regional Cooperation*. New York : Palgrave
- MacMillan. Liddle. (1967). *Strategy*. London: Faber.
- Jackson, R. & Sorensen, G. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- James N. R. (1980). *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press, hal.171,173.
- James N. R. (1969). *International Politics and Foreign Policy. A reader in research and theory*. New York: The Free Press, hal. 199-205.
- James N. R. (1974). *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings and Methods*. New York: Sage Publication, hal. 47.
- James N. R. (1981). *The Study of Political Adaptation.: Essays on the Analysis of world Politics*. New York: Nichols Publishing, hal. 42.
- Jemadu, A. (2014). *Politik Global dalam teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Jensen, L. (1982). *Explaining Foreign Policy*. Prentice Hall inc, Englewood Cliff.
- J.G Starke. (2004). *Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kartasasmita, K. (1997). *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Kemhan RI. (2015). *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta : Kemhan RI.
- Lovel, J.P. (1970). *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. NewYork, Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Mugerwa, N.(2005). *Subject of International Law dalam Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- S.L Roy. (1995). *Diplomasi. Edisi Kedua*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Staf Um Mabel. (2021). *Informasi Kerjasama TNI AL-Royal New Zealand Navy (RNZN)*. Dokumen pribadi peneliti.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suroyo. (2012). *Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Produksi Pertanian Pangan Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan dalam Rangka Kemandirian Bangsa*. Taskap Program Reg Angkatan XLVIII Lemhannas RI.
- Toma, P.A dan Gorman, R.F. (1991). *International Relations : Understanding Global Issues*. Pasific Grove, California : Brooks Cole Publishing Company, hal. 135-136.
- Yusuf, S.. (1989). *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jurnal

- Elisabeth. (2006). Dimensi Internasional Kasus Papua. *Jurnal Penelitian Politik Vol 3 No. 1 2006, ejournalpolitik.lipi.go.id*.
- Fadhilah, M. (2019). Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri *Melanesia Spearhead Group (MSG)* dalam isu Papua Barat. Studi Kasus Fiji dan Papua Nigini. *Indonesian Perspective Vol 4 No 1 (Januari-Juni 2019 : 59-81*.
- Helmy, B. (2019). Mematahkan Dukungan Vanuatu terhadap Gerakan ULMWP (*United Liberalization Movement for West Papua*) Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI. *Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 38 Juni 2019*.
- Hematang, F.A.R. (2019). Diplomasi Pertahanan Indonesia di Negara Kawasan Pasifik Selatan terkait Internasionalisasi Separatisme Papua Guna menjaga Kedaulatan Indonesia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan (Agustus 2019) Vol 5 No. 2*.
- K. J. Holsti. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, Vol. 14, No.3, 1970, hlm. 233-309.
- Nincic, M. (1992). A sensible Public: New Perspectives on Popular Opinion and Foreign Policy. *Journal of Conflict Resolution, December 1, 1992*.
- Prayuda, R. & Sundari, R. (2020). Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*.
- Putra, G.N.S. et.al. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia terhadap Negara-negara Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam Menghadapi Propoganda Organisasi Papua Merdeka (OPM): Studi Kasus negara Republik Vanuatu. *Jurnal Peperangan Asimetris, Agustus 2019, Vol 5 No. 2*.

- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional. Tahun XI, No. 1 Januari- Juni 2018*.
- Satriawan, A. (2016). Kebijakan Indonesia membuka Hubungan Diplomatik dengan Negara- negara Kawasan Pasifik (Tuvalu, Nauru, Kiribati). *JOM Fisip Vol 3 No. 2 Oktober 2016*.
- Sudarsono, B.P. et.al. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. Desember 2018, Vol 8 no. 3*.
- Walter, C. (2016). The Agency-Structure Problem in foreign Policy Analysis. *International Study Quarterly, Vol 36 No. 3 2016, hlm. 245-270*.

Undang-Undang/Peraturan

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Website

- Aditya, N.R. (2021). *Sederet Langkah yang bisa Diambil Pemerintah untuk Akhiri Konflik di Papua*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/09545191/sederet-langkah-yang-bisa-diambil-pemerintah-untuk-akhiri-konflik-di-papua?page=all> pada 13 Jan 2024.
- Anriani, S. (2019). *Menjaga Kedaulatan Negara di Tanah Papua*. Diakses Di <https://www.inews.id/news/nasional/menjaga-kedaulatan-negara-di-tanah-papua>, pada 13 Jan 2024.
- Arya, Y. (2020). *Sejarah Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Pasifik Selatan*. Diakses di <https://yoursay.suara.com/news/2020/12/12/102238/sejarah-hubungan-indonesia-dengan-negara-negara-pasifik-selatan?page=all> pada 13 Jan 2024.
- Bonasir, R. (2019). *Upaya Internasionalisasi Papua: 'Negara-negara Anggota PBB lebih banyak dengar suara Pemerintah Indonesia*. Diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50498660> pada 13 Jan 2024..
- CNN Indonesia. (2019). *Vanuatu Si Kecil di Pasifik pendukung Kemerdekaan Papua*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191002160752-113-436136/vanuatu-si-kecil-di-pasifik-pendukung-kemerdekaan-papua>, pada 13 Jan 2024.
- Evakurniadji. (2018). *Parlemen Selandia Baru tidak akan Bantu Papua Merdeka*. Diakses di <https://www.antaranews.com/berita/780487/parlemen-selandia-baru-tidak-akan-bantu-papua-merdeka> pada 13 Jan 2024.
- Kemhan RI. (2017). *Menhan RI- Menhan Selandia Baru Tandatangani Pernyataan Bersama Kerjasama Pertahanan Kedua Negara*. Diakses di <https://www.kemhan.go.id/2017/05/31/menhan-ri-menhan-selandia-baru-tandatangani-pernyataan-bersama-kerjasama-pertahanan-kedua-negara.html> pada 13 Jan 2024.
- Safitri, E. (2019). *Bertemu Anggota Parlemen New Zealand, Mahfud : Mereka Dukung Papua Bagian RI*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4790892/bertemu-anggota-parlemen-new-zealand-mahfud-mereka-dukung-papua-bagian-ri> pada 13 Jan 2024.
- Taher, A.P. (2019). *Sousi Konflik Papua, Mahfud MD: Tidak Ada Kebijakan Baru*. Diakses di <https://tirto.id/solusi-konflik-papua-mahfud-md-tidak-ada-kebijakan-baru-epiP> pada 13 Jan 2024.
- Zack. (2015). *Pengertian Kampanye Militer*. Diakses di <https://ilmubelanegara.wordpress.com/2015/07/02/pengertian-kampanye-militer/> pada 13 Jan 2024.